

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN  
KECAMATAN PADA LAYANAN PEMBUATAN  
KARTU KELUARGA DI KECAMATAN  
JAKABARING KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

**HOZIZAH ERIN SAPUTRI  
07011381924160**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FEBRUARI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN  
KECAMATAN PADA LAYANAN PEMBUATAN  
KARTU KELUARGA DI KECAMATAN  
JAKABARING KOTA PALEMBANG  
SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**

**Oleh :  
HOZIZAH ERIN SAPUTRI  
07011281924160**

**Telah disetujui oleh dosen Pembimbing 01 Februari 2023**

**Pembimbing**

**Tanda Tangan**

**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
MPA NIP. 196911101994011001**



**Mengetahui  
Ketua Jurusan**



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

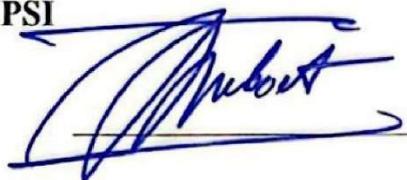
# ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN PADA LAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG

## SKRIPSI

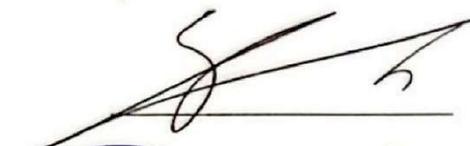
Telah Dipertahankan di Depan Tim  
Penguji pada Tanggal 16 Februari 2022  
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

### TIM PENGUJI SKRIPSI

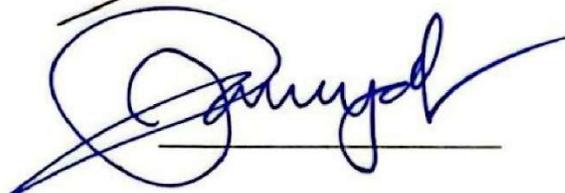
Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos.,MPA  
Ketua



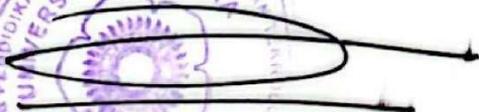
Dr. Sena Putra Prabujaya,S.AP.,M.AP  
Anggota



Januar Eko Aryansyah,S.IP.,SH.,M.Si  
Anggota



Mengetahui,

 <p>Dekan FISIP UNRSI, Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	 <p>Ketua Jurusan Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
--	--

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hozizah Erin Saputri

NIM : 07011381924160

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Dampak Kebijakan Pemekaran Kecamatan Pada Layanan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang “ ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan  
Palembang 17 Januari 2023



Hozizah Erin Saputri  
NIM.07011381924160

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan seberapa besarnya pengaruh dampak Pemekaran Kecamatan terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang kepuasan dan kelancaran masyarakat dalam mengurus administrasi menjadi tolak ukur dalam dampak pemekaran kecamatan ini terutama dalam pengurusan kartu keluarga ,dan menjadi landasan dari tujuan pemekaran itu sendiri yang berhasil tidaknya dalam pelaksanaan kebijakan ini lalu sesuai tidak dengan yang di rencanakan sebelumnya. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat skripsi ini didasarkan pada hasil pengamatan wawancara awal yang penulis lakukan pada kantor Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ,dimana pada saat wawaancar terkait apa saja pelayanan administrasi yang tersedia di kantor Kecamatan Jakabaring yang paling sering di lakukan masyarakat ialah pada tahun 2017 setelah di mekarkan pengurusan administrasi yang paling ramai adalah pengurusan kartu keluarga . dimana penulis menemukan indikasi masalah dengan apa saja dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya pemekaran Kecamatan itu sendiri yang menjadi tolak ukur adalah data agenda pengurusan kartu keluarga dan wawancara yang yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan yang meliputi observasi dan wawancara. Adapun dalam penentuan sampel penulis menggunakan analisis menurut Miles & Huberman (2014:31) dengan penilaian 3 aktivitas bersamaan yaitu kondensasi data,tampilan data ,mengambarkan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan adanya tingkat pelayanan administasi sesuai dengan teori dampak kebijakan dari hasil data data agenda administrasi kartu keluarga yang menunjukkan kemajuan tingkat pelayanan administrasi di Kecamatan Jakabaring. Berdasarkan hasil penelitian analisis dari kesimpulan pembahasan maka penulis mengajukan saran saran sebagai berikut :perlu nya peningkatan sdm yang berpendidikan dan berpengalaman,adanya nomor antrian agar memudahkan masyarakat,sarana dan prasarana yang di lengkapi lebih lengkap.

Dosen pembimbing,



**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

Indralaya 01 Maret 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Seriwijaya

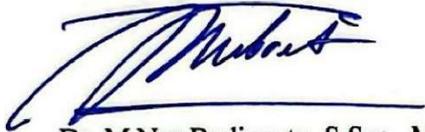


**Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRACT

This thesis is the result of research that describes how much influence the impact of Sub-district Expansion has on public services at the Jakabaring Sub-district Office, Palembang City, the satisfaction and smoothness of the community in taking care of administration is the benchmark in the impact of this sub-district expansion, especially in the management of family cards, and is the basis of the expansion goal itself which is successful or not in the implementation of this policy and according to what was planned before. The background of the author's interest in making this thesis is based on the results of preliminary interview observations that the author conducted at the Jakabaring District Office, Palembang City, where at the time of the interview related to what administrative services are available at the Jakabaring District Office, the most frequent administrative service provided by the community is in 2017 after the expansion of the most crowded administrative management is family card management. where the author finds an indication of the problem with what the impact caused after the expansion of the District itself is the benchmark is the agenda data for family card management and interviews conducted. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach with data collection techniques through field studies and which include observation and interviews. As for determining the sample, the author uses analysis according to Miles & Huberman (2014: 31) with an assessment of 3 concurrent activities, namely data condensation, data display, drawing / verifying conclusions. The results of the research conducted by the author show the level of administrative services in accordance with the theory of policy impact from the results of the family card administration agenda data which shows the progress of the level of administrative services in Jakabaring District. Based on the results of the research analysis of the conclusion of the discussion, the authors propose the following suggestions: the need to increase educated and experienced human resources, the existence of queue numbers to make it easier for the community, facilities and infrastructure that are more complete.

Dosen pembimbing,



Dr. M Nur Budiyo, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

Indralaya 01 Maret 2023  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Seriwijaya



**Dr. M Nur Budiyo, S.Sos., MPA**  
**NIP. 196911101994011001**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang ”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana dan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sholawat dan salam penulis hadiahkan keharibaan nabi besar kita, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam yang telah mengentaskan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang oleh lampu pijar ilmu pengetahuan. Semoga sekalian salam tetap atasnya dan tercurah kepada keluarga, sahabat-sahabat serta para pengikutnya yang setia.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis hendak menyampaikan bahwa segala apa yang telah dicapai oleh penulis sampai pada titik ini, bukanlah semata karena usaha dari penulis, melainkan semata-mata karena karunia dari Allah Ta'ala dan doa-doa yang tiada henti-hentinya dilangitkan oleh kedua orangtua. Untuk itu, skripsi ini, yang paling utama, penulis persembahkan atas nama kedua orangtua tercinta, yakni Bapak Antoni dan Ibu Sri Suheri Terima kasih sudah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, cinta, dan inspirasi yang tiada hentinya. Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki jasa besar terhadap kehidupan penulis, antara lain:

1. Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
2. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Allan Gunery.S.STP.,M.H selaku Kepala Bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang
4. Bapak Sukirman.ST selaku kepala sub bagian administrasi kewilayahan bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang
5. Bapak Mukhtiar Hijrun,S.STP selaku Camat di kecamatan seberang ulu 1 kota Palembang beserta para jajaran yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian skripsi;
6. Bapak Aris Varizal,S.Kom selaku Kasi Pemerintahan dan staff di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang.
7. Bapak Drs.Rahmat Maulana selaku Camat Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
8. Dan Staff di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang
9. Bapak Dr.M Nur Budiyanto,S.Sos.,MPA Selaku pembimbing Skripsi
10. Sahabat dekat saya Tiana Lisa dan Tarisya Amanda yang telah saling mendukung, membantu, dan mendengarkan keluh kesah penulis;
11. Sahabat luar biasa saya yang selalu bersedia mendengarkan seluruh keluh kesah saya serta selalu mendukung saya selama penulisan skripsi dan banyak membantu saya dalam segala hal yaitu Bripda Muhammad Daffa Naufal .
12. Seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk perbaikan penulis di masa mendatang. Semoga hasil laporan ini bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, maupun Sekretariat Kota Palembang , khususnya untuk perkembangan Ilmu Administrasi Publik.

Palembang, Februari 2023

Hozizah Erin Saputri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
2.1 Konsep Kebijakan .....	10
2.2 Kebijakan Publik.....	15
2.3 Implementasi Kebijakan.....	21
2.4 Pelayanan Publik.....	36
2.5 Dampak Kebijakan.....	46
2.6 Penelitian Terdahulu.....	55
2.7 Pemetaan Hasil Penelitian terdahulu .....	72
2.8 Kerangka Pemikiran .....	73
<b>BAB III</b> .....	<b>72</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>72</b>
3.1 Desain Penelitian.....	72
3.2 Informan Penelitian .....	76
3.3 Prosedur Pengumpulan Data .....	77
3.4 Metode Analisis Data .....	77
3.5 Data condensation (Kondensasi Data).....	79
3.6 Data Display (Tampilan Data).....	80
3.7 Drawing and Verifying Conclusions (Menggambar dan Memverifikasi Kesimpulan).....	82
<b>BAB IV</b> .....	<b>84</b>
<b>GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>84</b>
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Jakabaring .....	84

4.1.1 LUAS KECAMATAN MENURUT KELURAHAN .....	85
4.1.2 KELURAHAN YANG DIBAWAHI KECAMATAN JAKABARING .....	86
4.1.3 PENDUDUK KECAMATAN JAKABARING.....	88
4.1.4 VISI MISI KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG .....	89
4.1.6 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 .....	94
4.2 PEMEKARAN KECAMATAN DAN PELAYANAN PUBLIK .....	95
4.2.1 Aspek Kecakapan Dan Keandalan Petugas Pelayanan .....	100
4.2.2 Aspek Keramahan .....	101
4.2.3 Aspek Kejelasan Dan Kepastian Pelayanan.....	102
4.3. ASPEK LINGKUNGAN .....	103
4.3.1. Kemudahan Akses.....	104
4.3.2.Kenyamanan.....	105
4.4. ASPEK KETERSEDIAAN DATA .....	106
4.5. ASPEK EKONOMI .....	110
4.6. ASPEK PSIKOLOGIS .....	111
4.6.1.Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelayanan .....	113
4.7. ASPEK MASYARAKAT .....	113
4.7.1. Tingkat Kepuasan.....	114
4.7.2. Tolak ukur .....	114
4.8. Dampak Negatif Pemekaran Kecamatan .....	115
4.8.1. Kekurangan Sumber Daya Manusia yang Berpengalaman dan Berpendidikan. .....	115
4.8.2. Sarana dan Prasarana yang belum layak.....	117
4.9. Dampak Positif Pemekaran Kecamatan Jakabaring.....	117
4.9.1. Pelayanan yang mudah dan cepat.....	118
4.9.2. Meminimalisir Panjang antrian .....	119
<b>BAB V .....</b>	<b>120</b>
<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>121</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	<b>Kualitatif ( Miles,M.B., &amp; Huberman,A.M (1994).....</b>	<b>53</b>
<b>Gambar 4.1</b>	<b>Kantor kecamatan Jakabaring Kota Palembang.....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 4.2</b>	<b>peta Letak kecamatan Jakabaring .....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 4.1 1</b>	<b>Gambar data luas daerah terhadap luas kecamatan .....</b>	<b>58</b>
<b>Gambar 4.1 2</b>	<b>Gambar Jarak Kecmatan dari pusat kota .....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 4.1 3</b>	<b>Gambar jumlah kelurahan dan rt rw.....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 4.1 4</b>	<b>Gambar Data Kepadatan Penduduk.....</b>	<b>61</b>
<b>Gambar 4.1 5</b>	<b>Gambar Visi Misi Kecamatan Jakabaring .....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 4.1 6</b>	<b>Gambar Data Pegawai Kecamatan Jakabaring .....</b>	<b>67</b>
<b>Gambar 4.1 7</b>	<b>Gambar pelayanan di Website Kecamatan Jkabaring.....</b>	<b>76</b>
<b>Gambar 4.1 8</b>	<b>Moto Pelayanan Kecamatan Jakabaring .....</b>	<b>81</b>
<b>Gambar 4.1 9</b>	<b>Maklumat Pelayana Kecamatan Jakabaring .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian terdahulu .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4. 1 agenda Kependudukan kartu keluarga 2016-2017.....</b>	<b>78</b>
<b>Tabel 4. 2 Agenda Data Kependudukan Kartu Keluarga 2018-2019 .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 4. 3 Jumlah agenda 2016-2019 .....</b>	<b>80</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia mempunyai bentuk negara kesatuan yang kokoh dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Desentralisasi sebagai implikasi negara kesatuan dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu terhadap tanggung jawab urusan pemerintahan. PP No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan tersebut menjelaskan bentuk kewenangan dari pemerintah daerah antara lain pemerintah daerah mempunyai kewenangan melakukan pemekaran wilayah yakni Penghapusan, Penggabungan, Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Seiring dengan dinamika dan permasalahan dan berkembang di masyarakat dengan begitu cepat pelayan masyarakat untuk lebih berbenah keterampilan sumber daya manusia, memperbaiki kinerja, menetapkan organisasi serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Salah satu jenis pembentukan daerah adalah pemekaran daerah. Menurut Trueblood etc dalam Santoso (2015: 35)<sup>1</sup> pemekaran (*fragmentation*) diartikan sebagai pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah. Harapan meratanya pelayanan publik dengan pelaksanaan desentralisasi tersebut sebagaimana yang diinginkan pemerintah daerah. Juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah terkait pada daerah yang jumlah penduduknya tinggi dan tidak, sebagaimana diketahui bahwa kecamatan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang merata, efisien, dan efektif. Oleh karena itu penting bagi Kota Palembang melakukan pemekaran kecamatan yaitu dengan cara membentuk suatu kecamatan baru, yakni Kecamatan Jakabaring pembentukan kecamatan Seberang Ulu 1 di Kota Palembang pada PERDA no 5 Tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Jakabaring yang terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi “Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Jakabaring sebagai pemekaran Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir Timur Tiga sebagai pemekaran Kecamatan Ilir Timur II “ dan mempunyai tujuan tertentu seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 “Tujuan dibentuknya Kecamatan Jakabaring dan Kecamatan Ilir Timur Tiga adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas Suatu organisasi atau lembaga dalam pemerintahan daerah yang disebut dengan kecamatan memberikan bantuan dan laporan kepada kepala daerah. kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah harus membagi kecamatan berdasarkan apakah pelaksanaannya berpengaruh positif atau negatif terhadap

---

peningkatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan daerah dan cara peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*Kasus et al., 2021*).

Secara administratif, kecamatan terbagi atas beberapa wilayah yang terdiri dari desa atau kelurahan yang berada di tingkat kabupaten atau kota yang lebih rendah. Indonesia memiliki struktur otonomi daerah dimana kecamatan sebagai komponen wilayah kabupaten dan kota memiliki wilayah kerja dengan seorang pemimpin yaitu camat pada umumnya. (*Poma et al., 2021*) pembinaan wilayah". Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menalisis dampak pemekaran kecamatan terhadap efektivitas pelayanan publik di Kecamatan pengamatan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa sebelum adanya pemekaran kecamatan Jakabaring layanan yang diberikan kepada warga masyarakat, sering menimbulkan ketidak puasan. layanan pengurusan pengantar Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang akan dilanjutkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palembang serta pengurusan lainnya yaitu Surat Ijin Tempat Usaha, pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan, dan berbagai jenis perijinan yang di keluarkan oleh pemerintah kecamatan namun saya terfokus untuk menalisis dan mencari masalah dalam mekanisme pengurusan kartu keluarga.

Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan public juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan

masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Salah satu jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Seberang ulu satu yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat adalah pelayanan bidang administrasi kependudukan, bahwa identitas kependudukan merupakan kebutuhan vital bagi warga penduduk/masyarakat, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan seberang ulu satu masih rendah dari yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang demikian Pemerintah memekarkan Kecamatan Seberang ulu satu menjadi memekarkan Kecamatan Jakabaring dan memerlukan penanganan secara khusus untuk mengatasi kendala karena keadaan geografis tersebut, serta didorong oleh keinginan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga secara bertahap perlu diperlukan pegawai yang ditempatkan secara profesional, berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan studi kasus mengenai Pemekaran Kecamatan ya dengan pelayanan publik bidang Surat Pengantar Kartu Kartu Keluarga.

Landasan Pemekaran ini sudah dijelaskan pada peraturan pemerintah yang Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah

memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan. Peraturan yang sebelumnya Perda Nomor 5 Tahun 2017 dan sekarang menjadi Perda nomor 6 Tahun 2019 .

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti : Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan Jakabaring.

Kecamatan Jakabaring ini merupakan wilayah yang baru dimekarkan pada tahun 2017 dari wilayah induk yaitu kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Pemekaran wilayah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang pemekaran Kecamatan Jakabaring, seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan public yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial, demikian halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Jakabaring, hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Jakabaring terhadap pelayanan public di wilayah ini, khususnya dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga.

Berdasarkan tujuan tersebut, pembentukan kecamatan Jakabaring diharapkan mampu mendekatkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif. Dengan dibentuknya Kecamatan Jakabaring, masyarakat tidak perlu mengantri lama seperti sebelumnya yang hanya terpusat di 2 kecamatan yaitu kecamatan Seberang ulu 1 dan ilir timur II . Sehingga setelah pemekaran kecamatan, pelayanan publik dapat diberikan melalui kecamatan Jakabaring dan ilir timur III Pembentukan kecamatan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi efektif dan efisien.

Dengan adanya pembentukan Kecamatan Jakabaring, diharapkan memberikan perubahan sesuai dengan tujuan pembentukannya yaitu peningkatan pelayanan publik. Namun dalam pembentukan/pemekaran Kecamatan Jakabaring dapat saja menjadikan pelayanan tidak efektif apabila belum adanya kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia yang berkompeten. Oleh sebab itu seharusnya pemekaran kecamatan dilakukan karena kebutuhan pelayanan publik bukan kepentingan kekuasaan. Berdasarkan permasalahan yang telah digambarkan di atas, diketahui bahwa pemekaran kecamatan dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan dan luas wilayah yang tidak seimbang, untuk memenuhi persyaratan sebagai kota, dan meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan alasan- alasan tersebut, pemekaran wilayah kecamatan Jakabring menjadi sebuah kecamatan sangat berdampak pada pelayanan publik di wilayah tersebut. Hal itu terlihat khususnya dalam hal penerbitan surat izin pembuatan kartu keluarga yang menjadi objek penelitian tulisan ini, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan proses administrasi pembuatan kartu

keluarga di Kecamatan Jakabaring serta membandingkannya dengan proses yang sama pada saat sebelum di mekarkan.

Dimana kita tahu pengertian dampak menurut ( W.J.S Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, 2005) tentang pengertian dampak pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Dampak negative adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negative, sedangkan dampak positif merupakan sebaliknya yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif, maka dari itu teori Dampak Kebijakan yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Dampak internal, meliputi : 1. Ketersediaan data 2. Lembaga atau organisasi Dampak Eksternal meliputi, : 1. Lingkungan 2. Masyarakat 3. Psikologis 4. Ekonomi Pemilihan dampak kebijakan ini diambil dari beberapa teori dampak kebijakan dari Thomas dye, Langbein Weiss .Finterbusch and motz dan untuk menganalisa tulisan ini akan menggunakan konsep pemerintah tentang pelayanan public yang tertuang dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 .

Beberapa Tulisan yang membahas mengenai isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini telah ada, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa peneliti yang dalam judul tulisannya, baik berupa jurnal, artikel, maupun bentuk tulisan lainnya. Beberapa literatur diantaranya setidaknya telah memuat tema yang akan dibahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini diantaranya mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik (*suatu studi di kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga*) yang ditulis oleh Silvana Yosephus, Analisis dampak pemekaran Kecamatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang yang di tulis oleh Juherda, lalu Pengaruh Pemekaaan Kecamatan

terhadap Persepsi Masyarakat tentang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat studi di Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang Jawa Timur yang ditulis oleh Nurul Hidayani dan Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang yang ditulis oleh Lisa Agustina Dewi yang membahas tentang pengurusan kartu keluarga setelah Kecamatan itu di mekarkan yang merupakan topik pembahasan dari penulis.

Lingkungan pemerintahan umumnya, dijumpai banyak faktor yang menyebabkan kualitas pelayanan masih rendah struktur organisasi pemerintahan masih terlalu prosedur kerja yang harus dilalui, sehingga memerlukan waktu yang terlalu lama; persoalan yang seharusnya yang terlalu panjang rentan lebar; informasi yang kurangnya koordinasi jelas. jalur hirarki Sandali atau mekanisme pengendalian yang terlalu tidak cepat ditanggapi untuk diketahui dan diatasi: antara unit atau bagian; dan juga pembagian kerja yang kurang vai atau aparatur pemerintah yang ada sangat besar tetapi dengan kemampuan yang terbatas, sehingga sulit untuk dilakukan pembinaan secara efektif.

Kenyataan yang terjadi justru masyarakat yang melayani birokrasi, sikap dan perilaku yang tidak bersedia melayani masyarakat secara adil dan sama rata itu masih tampak di beberapa instansi, disamping itu rutinitas tugas pelayanan yang berlebihan pada pertanggung jawaban formal (*formal accountability*) telah menyebabkan prosedur kerja yang kaku dan lamban serta kurang *responsive*, yang sebelumnya kecamatan seberang jakabaring masih bagian dari kecamatan seberang ulu satu dan dengan berlakunya Perda Nomor 6 Tahun 2019 penulis tertarik itu mengkaji masalah itu yang dituangkan dalam judul : diharapkan dengan

penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pengaruh pemekaran wilayah terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari apa yang diuraikan diatas maka penulis ingin membatasi lingkup permasalahan dengan merumuskan masalah yang dikemukakan sebagai berikut:  
“Bagaimana Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Pada Layanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Jakabaring Kota Palembang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis dampak pemekaran wilayah dalam layanan penerbitan surat izin pembuatan kartu keluarga di kecamatan Jakabarig Kota Palembang.

## **1.4 Manfaat**

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pemekaran dan pelayanan publik; serta bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi staf kecamatan Jakabaring dalam pemberian layanan publik khususnya layanaan penerbitan surat izin pembuatan kartu keluarga dalam peningkatan kinerja.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat sekitar Kecamatan dalam proses layanan administrasi instansi tersebut.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan peneliti terkait pembuatan kartu keluarga di kecamatan dalam menambah pengalaman langsung bagi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subagyo, 2010, Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan  
Nugroho Rian, 2014, Metode penelitian  
Kabupaten Bandung, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,  
Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok  
Gramedia. Edwards III, George C. 2003. Implementing Public  
Policy. Jakarta
- Rachim, Ratri Furry P dan Hadi Sasana. (2013). Evaluasi Dampak Pemekaran  
Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik  
Di Kota Serang. Diponegoro Journal of Economics
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan  
R&D. Bandung: Alfabeta. Bungin, Burhan. 2003. Analisa Data  
penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Simanjuntak, Kardin M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi  
Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja
- Trikurniasih, Endah. Dkk. (2019). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap  
Kinerja Keuangan dan Pelayanan Publik. Journals of Economics  
and Business.
- Winarno, Budi, 2014. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi  
Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Wisudarini, Shanty dan Riyanto. (2021). Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap  
Kesejahteraan Masyarakat. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah  
Indonesia.
- Yosephus, Silvana (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan  
Publik (studi Kasus di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam  
Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga).
- Juherda, (2012). Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Dalam Pelaksanaan

Otonomi Daerah di Kecamatan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Hidayani, Nurul (2016). Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Presepsi Masyarakat Tentang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat : Studi di Kecamatan Ngunsika Kabupaten Jombang Jawa timur.

Dewi Agustina,Lisa (2012). Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah Pada Aspek Kualitas Pelayanan di Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang.

Imtikhana,Riza (2017). Pengaruh Pemekaran Kecamatan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Krangga Kota.

Onibala Melisa, Nancy (2016). Implementassi Kebijakan Pemekaran Desa Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.

Arunde,Irene dkk , (2014). Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Syuaib Rusli,Mohammad,dkk, (2022). Implementasi Kebijakan Pemekaran di Kecamatan Kota Selatan Kabupaten Poso.

Agung,Mulia (2016). Pengaruh Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.

Yusi Eva,Rohmadin Sulthon (2017) Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba.